



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 210 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DALAM DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, Tata Cara Seleksi, Persyaratan Administrasi dan Kuota Penerima ditetapkan dengan Petunjuk Teknis;

b. bahwa Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.304/2025, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Daerah dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Daerah, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Dalam Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.304/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

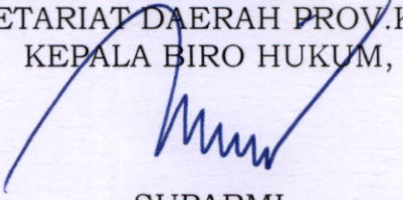
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 210 /2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DALAM
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA
PROGRAM PENDIDIKAN DALAM DAERAH

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Data BPS 2024).

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kalimantan Timur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai;
5. Menimbulkan dampak positif bagi perguruan tinggi dan program studi untuk memperoleh akreditasi yang lebih baik; dan
6. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Sasaran

Mahasiswa Aktif yang berasal dari Kalimantan Timur dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur.

II. Persyaratan Administrasi

A. Bagi Perguruan Tinggi

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyampaikan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait data mahasiswa aktif beserta Nomor Induk atau Nomor Pokok Mahasiswa (NIM/NPM), Asal Program Studi dan Fakultas serta besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada batas waktu yang ditetapkan; dan
3. Menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diatur dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025.

B. Bagi Mahasiswa

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
2. Pada saat pendaftaran secara online melampirkan masing-masing:
 - a. Pas Foto digital resmi terbaru;
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur;
 - c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
 - d. Keterangan/surat bukti diterima di perguruan tinggi atau bukti bagi mahasiswa baru, atau surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - e. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - f. Pernyataan tidak pernah menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
 - g. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Keterangan besaran UKT/SPP dari Universitas/Fakultas; dan
 - i. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;

III. Besaran Pembiayaan

1. Besaran Pembiayaan Pendidikan Dalam Daerah adalah sebesar UKT untuk Perguruan Tinggi Negeri atau SPP untuk Perguruan Tinggi Swasta, dengan batas atas sebagaimana termaksud lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025;
2. SPP yang diperhitungkan adalah SPP dan SPP variabel (jika ada) atau biaya SKS (jika ada);
3. Biaya SPP yang dimaksud pada nomor 2 sudah memperhitungkan biaya-biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), skripsi/tesis/disertasi, seminar tugas akhir, praktek kerja lapangan dan kegiatan akademik lainnya;
4. Dalam rangka mengakomodir komponen sebagaimana dimaksud pada nomor 3, maka besaran SPP ditetapkan sama pada setiap semester hingga batas waktu yang ditetapkan; dan
5. Program Pembiayaan Pendidikan Dalam Daerah tidak menanggung Sumbangan Pembangunan, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendaftaran, registrasi, biaya kostum/seragam dan sejenisnya.

IV. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

A. Bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai jangka waktu jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan jenjang Profesi sesuai program profesinya lama pendidikan 2 semester atau 4 semester;
2. Pendidikan jenjang D2 dan S2 lama pendidikan 4 semester;
3. Pendidikan jenjang D3 dan S3 lama pendidikan 6 semester;
4. Pendidikan jenjang D4 dan S1 lama pendidikan 8 semester; dan
5. Pendidikan jenjang Spesialis-1 lama pendidikan 10 semester.

B. Dalam hal pemohon bukan mahasiswa baru, pemberian bantuan pendidikan diberikan sejak yang bersangkutan mendaftar sampai dengan jangka waktu jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.

V. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

- a. Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media sosial, media massa, media elektronik, laman gratispol.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah.
- b. Perguruan tinggi mengirimkan SPTJM terkait nama-nama mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi yang dilengkapi dengan data :
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
 - 4) Besaran UKT atau SPP (tidak termasuk biaya pembangunan, Sumbangan Pembiayaan Pendidikan dan biaya non akademik lainnya);
 - 5) Besaran UKT atau SPP yang dimaksud pada butir (3) tidak melebihi besaran UKT/SPP pada tahun sebelumnya (tidak ada kenaikan UKT/SPP); dan
 - 6) Perguruan Tinggi Tidak mengirimkan data mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa lain seperti KIP-K atau jenis beasiswa lainnya.
- c. Jadwal

Jadwal pengiriman data oleh perguruan tinggi ditetapkan dan jadwal pendaftaran individu secara online oleh masing-masing calon penerima ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengelola Program Gratispol.

2. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara on-line dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah *ter-update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;

- 2) Surat Keterangan Diterima bagi mahasiswa baru atau surat keterangan Aktif Kuliah di Perguruan Tinggi dari pejabat yang berwenang (Dekan/ Bagian Akademik/ Direktur/ Bagian Kemahasiswaan/ pejabat lain) sesuai ketentuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan atau bukti lain seperti Kartu Rencana Studi (KRS) atau (Kartu Rencana Studi KHS);
- 3) Bukti besaran UKT/SPP dari Perguruan Tinggi;
- 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
 - Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
 - Surat Pernyataan bersedia mengikuti pendidikan sampai selesai;
 - Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
 - Surat Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

(Semua pernyataan diatas mengikuti format yang telah disediakan dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik))
- 5) Mengunggah (*upload*) bukti atau keterangan besaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari Perguruan Tinggi. SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel/SKS (jika ada). Tidak termasuk: biaya Her Registrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, Sumbangan Pengembangan Institusi, premi asuransi, uang buku dan sejenisnya;
- 6) Pas foto formal berwarna (*colour*) digital; dan
- 7) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

VI. Seleksi dan Penetapan

1. Seleksi calon penerima manfaat Bantuan Biaya Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing, sesuai dengan kriteria dan kuota yang telah ditetapkan dan terdaftar dalam SPTJM mahasiswa aktif;
2. Setiap calon penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi diwajibkan melakukan pendaftaran *online* secara individu melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id;

3. Seluruh calon penerima yang diajukan oleh perguruan tinggi dan telah mendaftar secara individu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 akan diverifikasi dan divalidasi
4. Verifikasi yang dimaksud pada angka 3 adalah verifikasi kriteria dan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program Gratispol
5. Validasi yang dimaksud pada angka 3 adalah validasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur;
6. Calon penerima manfaat yang dinyatakan lulus terverifikasi administrasi dan lulus validasi kependudukan, serta terdaftar dalam SPTJM daftar mahasiswa aktif di masing-masing Perguruan Tinggi, akan diumumkan sebagai Calon Penerima dalam laman gratispol.kaltimprov.go.id; dan
7. Calon penerima ditetapkan sebagai Penerima, melalui Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

VII. Kuota

1. Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan kuota jumlah penerima manfaat khusus mahasiswa baru pada setiap perguruan tinggi.
2. Untuk mahasiswa lama kuota mengikuti jumlah mahasiswa terdaftar yang memenuhi syarat.
3. Mekanisme penetapan kuota yang dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi mengusulkan jumlah kuota setiap program studi kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengelola Program Gratispol melakukan verifikasi terhadap usulan yang dimaksud pada huruf a;
 - c. Penetapan Kuota ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya;
 - 2) Rasio jumlah mahasiswa per dosen tetap dan tidak tetap mengacu pada data PDDikti;
 - 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas dan ruang laboratorium/studio; dan
 - 4) Ketersediaan anggaran.
 - d. Jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya;
 - e. Rasio jumlah mahasiswa per dosen tetap dan tidak tetap yang mengacu pada data PDDikti;
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas dan ruang laboratorium/studio; dan
 - g. Ketersediaan anggaran.

VIII. Penyaluran Beasiswa

1. Penyaluran Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap semester;
3. Pencairan/penyaluran tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur.
4. Penyaluran tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan studi;
5. Pembiayaan disalurkan sesuai batas masa studi yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur;
6. Penyaluran pembiayaan kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening perguruan tinggi masing-masing; dan
7. Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan calon penerima oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
2. Sanggahan diajukan pada sistem aplikasi yang telah disediakan;
3. Masa sanggah diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah nama-nama calon penerima baik perorangan maupun kolektif diumumkan ke publik;
4. Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah sanggahan;
5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

X. Pelaporan

1. Setiap penerima Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada Tim Pengelola Program Gratispol melalui aplikasi gratispol.kaltimprov.go.id; dan
2. Tim Pengelola Program Gratispol melaporkan pengelolaan program bantuan biaya Pendidikan Dalam Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;

2. Penerima Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester;
3. Bagi Program Studi yang pada awal kerjasama memiliki akreditasi Baik/C, maka dalam kurun waktu maksimal 2 tahun dilakukan evaluasi kemajuan akreditasi;
4. Bagi program studi yang akreditasinya tidak mengalami peningkatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan dilakukan evaluasi terhadap keberlangsungan kerjasama dengan program studi terkait;
5. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
6. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Daerah Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

XII. Ketentuan lain-lain

1. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka meskipun semua yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan, tetapi dibatasi pada jumlah maksimum tertentu sesuai jenjang dan jenis program studi yang ditetapkan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
2. Besaran jumlah maksimum (Batas Atas) yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

XIII. Penutup

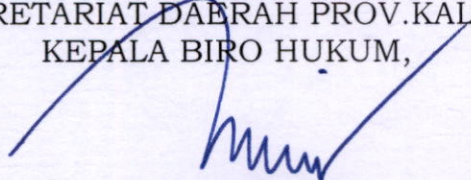
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Bantuan Biaya Program Pendidikan Dalam Daerah dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian.

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009